



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 25 Oktober 2023

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan BP2MI



Penjelasan :

Beredar tangkapan layar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Akun tersebut menggunakan nama "LAYANAN BP2MI PUSAT" sebagai penyalur dana bantuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Faktanya, akun WhatsApp tersebut adalah penipuan. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara melalui akun Instagram resminya [@bp3mi_kaltara](https://www.instagram.com/bp3mi_kaltara), menyatakan bahwa akun media sosial resmi BP2MI hanya yang bercentang biru. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BP2MI. Apabila menemukan akun-akun yang mencurigakan seperti yang tersebar tersebut, segera laporkan ke *call center* BP2MI di 0-800-1000 untuk jaringan dalam negeri dan 62 21-2924-4800 untuk jaringan luar negeri.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.instagram.com/p/CynTH1hy1vW/>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 25 Oktober 2023

2. [DISINFORMASI] Mahfud MD Mengaku Dipaksa dan Dibayar Rp800 Miliar untuk Jadi Cawapres Prabowo Subianto



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video pada media sosial Facebook yang mencatat nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Unggahan tersebut disertai dengan klaim narasi Mahfud MD mengaku dipaksa dan dibayar Rp800 miliar untuk jadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Dikutip dari artikel berita [kompas.com](https://www.kompas.com), isi video dengan narasi video tidak sesuai. Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari laman [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) yang diunggah pada tanggal 21 Oktober 2023 dengan judul "Mahfud Merasa dari Awal Di-endorse Jokowi Diam-diam untuk Pilpres". Thumbnail pada video tersebut juga identik dengan foto pada artikel berita [kompas.com](https://www.kompas.com) yang diunggah pada 2 November 2022 dengan judul "Jokowi Mendadak Tak Hadir Langsung di Forum R20, Mahfud MD Ungkap Alasannya".

Disinformasi

Link Counter:

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/10/24/155142282/hoaks-mahfud-mengaku-dipaksa-da-n-dibayar-rp-800-miliar-untuk-jadi?page=all#page2>
- https://www.kompas.tv/nasional/344204/jokowi-mendadak-tak-hadir-langsung-di-forum-r20-mahfud-md-ungkap-alasannya?_ga=2.77157077.1935877508.1698189824-906622727.1688661229
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231021043511-617-1014101/mahfud-merasa-dari-awal-di-endorse-jokowi-diam-diam-untuk-pilpres/amp>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 25 Oktober 2023

3. [DISINFORMASI] Penduduk Dibawah 17 Tahun Bisa Memiliki SIM A



Penjelasan :

Beredar sebuah informasi di media sosial X yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan penduduk dibawah usia 17 tahun bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A apabila telah memiliki SIM C.

Faktanya, dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi terkait klaim yang dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Diketahui informasi yang beredar tersebut merupakan satire yang dilemparkan salah seorang masyarakat pasca keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Disinformasi

Link Counter:

- <https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-PENDUDUK-DI-BAWAH-17-TAHUN-BIS-A-MEMILIKI-SIM-A>
- <https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-benarkah-remaja-di-bawah-17-tahun-kini-boleh-kantongi-sim-a-37214-mvk.html>



KOMINFO

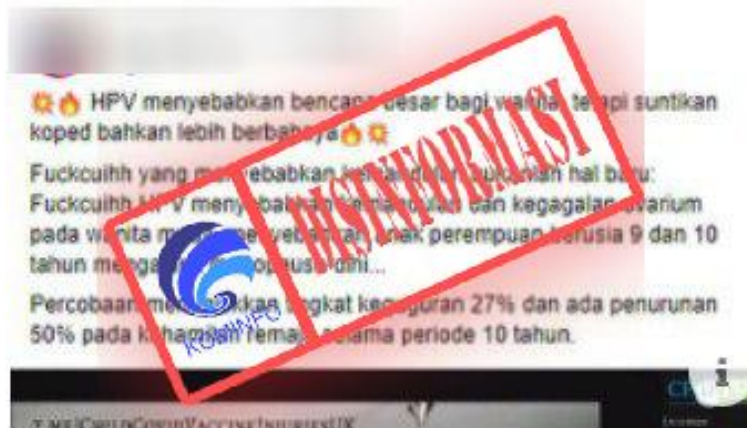
LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 25 Oktober 2023

4. [DISINFORMASI] Vaksin HPV pada Anak Perempuan Sebabkan Menopause Dini



Penjelasan :

Beredar sebuah informasi berisi klaim bahwa vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) pada anak perempuan dapat menyebabkan menopause dini, bahkan kemandulan.

Faktanya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan tidak ada bukti yang membenarkan klaim vaksin HPV bisa menyebabkan gangguan reproduksi pada wanita. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Mohammad Syahril menegaskan bahwa imunisasi HPV sudah dipastikan keamanannya dan pada umumnya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Ia juga menambahkan, saat vaksin HPV diberikan dua dosis pada perempuan usia 9-13 tahun akan memiliki peluang menghindarkan dari kanker serviks hingga 100 persen. Lebih lanjut, dilansir dari mediaindonesia.com, pakar mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Yeva Rosana mengatakan penyuntikan vaksin HPV tidak berkaitan dengan kemungkinan kemandulan pada perempuan lantaran vaksin tersebut justru menghindarkan area reproduksi perempuan dari infeksi.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://cekfakta.tempo.co/fakta/2508/keliru-vaksin-hpv-pada-anak-perempuan-sebabkan-menopause-dini-dan-mandul>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/620512/pakar-tegaskan-tidak-ada-kaitan-vaksinasi-hpv-dengan-kemandulan>



KOMINFO

LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Rabu, 25 Oktober 2023

5. [DISINFORMASI] Dua Pejabat Kemenko Perekonomian Terjerat Kasus Tindak Pidana Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Twitter dan TikTok yang mengklaim bahwa Kejaksaan Agung telah mengusut kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemeriksaan tersebut telah dilakukan dengan menyeret dua pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Kemenko Perekonomian dan juga melansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna membantah bahwa dua pejabat dari Kemenko Perekonomian telah terseret kasus korupsi impor gula yang dilakukan oleh Kemendag. Pemanggilan dua pejabat dari Kemenko Perekonomian ke Kejaksaan Agung hanya sebagai saksi untuk pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengusutan dugaan tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa proses pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi di Kemendag masih dilakukan sampai saat ini.

Disinformasi

Link Counter:

- Surat Sekretariat Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : HM.4-29/SET.M.EKON.2/10/2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/19081321/kejagung-periksa-2-pejabat-kemenko-perekonomian-di-kasus-dugaan-korupsi>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231020111912-12-1013741/kejagung-periksa-2-pejabat-kemenko-perekonomian-saksi-kasus-impor-gula>